



## **Pendampingan Pelaporan SPT OP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan dalam Rangka Meningkatkan *Tax Compliance***

**Priska Ermawati<sup>1\*</sup>, Muhammad Asim Asy'ari<sup>2</sup>, Rahmat Zuhdi<sup>3</sup>**

Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura  
e-mail: [friskaermawati@gmail.com](mailto:friskaermawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [ma.asyari58@gmail.com](mailto:ma.asyari58@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Rahmat.zuhdi@trunojoyo.ac.id](mailto:Rahmat.zuhdi@trunojoyo.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pendampingan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi (OP) yang dilaksanakan oleh Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan bersama KPP Pratama Bangkalan merupakan upaya penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi perpajakan, dan pendampingan teknis pengisian serta pelaporan SPT, ASN di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan dibantu untuk memahami kewajiban perpajakan serta melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu. Pendampingan ini dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak dan meminimalisasi kesalahan pelaporan, sehingga berkontribusi pada peningkatan tax compliance. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi aktif, program ini diharapkan dapat memperkuat budaya kepatuhan pajak di kalangan ASN Kabupaten Bangkalan.

**Kata Kunci:** *Pendampingan SPT OP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Kepatuhan Pajak, UMKM, Pelaporan Pajak, Tax Compliance, Kabupaten Bangkalan.*

### **Abstract**

The purpose of the Assistance with filing Personal Income Tax Returns (SPT) for Individuals (OP) conducted by the Diploma Three Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Trunojoyo University Madura at the Cooperative, Micro Business and Trade Office of Bangkalan Regency together with KPP Pratama Bangkalan is an important effort in improving tax compliance among civil servants in the Bangkalan Regency Government. Through socialization activities, tax education, and technical assistance in filling out and reporting tax returns, civil servants at the Bangkalan Regency Cooperative, Micro Business and Trade Office are assisted in understanding their tax obligations and reporting their tax returns correctly and on time. This assistance is intended to increase tax awareness and minimize reporting errors, thereby contributing to improved tax compliance. Despite challenges such as limited resources and active participation, this program is expected to strengthen the culture of tax compliance among civil servants in Bangkalan Regency.

**Kata Kunci:** *SPT OP Assistance, Cooperative, Micro Business and Trade Office, Tax Compliance, SMEs, Tax Reporting, Tax Compliance, Bangkalan Regency.*

## PENDAHULUAN

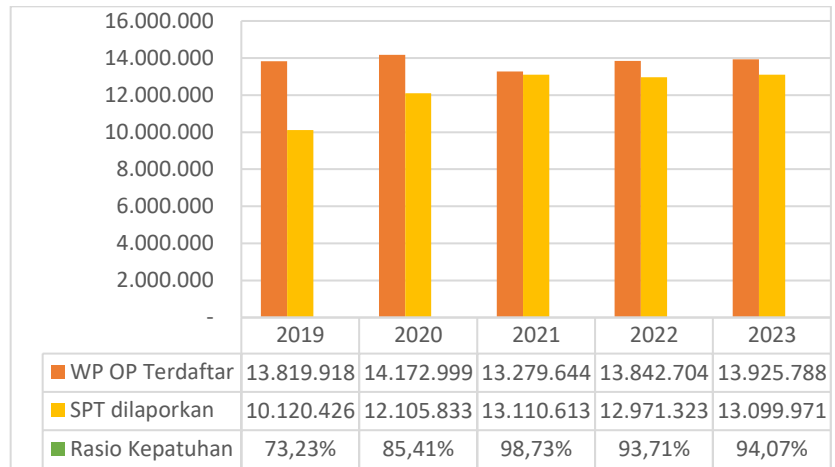
Kepatuhan pelaporan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu dan benar. Kepatuhan ini sangat penting karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Zahra Gunawan dkk., 2024). *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak) khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP), merupakan salah satu indikator utama efektivitas sistem perpajakan. Secara khusus, kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi mencakup beberapa aspek utama (Direktorat Jenderal Pajak, 2025):

1. Melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Mengisi SPT dengan data yang benar, lengkap, dan jelas mengenai penghasilan, pengeluaran, serta kewajiban perpajakan lainnya.
3. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali yang telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran pembayaran dari otoritas pajak.
4. Mematuhi seluruh ketentuan administrasi perpajakan, termasuk pembayaran sanksi jika terjadi keterlambatan pelaporan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment* system yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2007). Literasi pajak didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pengisian dan pelaporan SPT, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi ketidakpatuhan. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu (Kuhuparuw dkk., 2022).

Kepatuhan pelaporan SPT tidak hanya mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya target penerimaan pajak negara. Ketidakpatuhan, seperti keterlambatan atau tidak melaporkan SPT, dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda. Banyak ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan khususnya pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur administrasi perpajakan, perhitungan pajak, serta tata cara pelaporan SPT yang benar. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran pajak (Prabowo dkk., 2025). Pelaporan SPT Tahunan bagi PNS/ASN di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan salah satu bentuk nyata kepatuhan dan tanggung jawab

ASN sebagai wajib pajak. Melalui pelaporan SPT Tahunan, ASN menunjukkan komitmen untuk mendukung penerimaan negara serta menjadi teladan dalam membangun budaya kepatuhan pajak di lingkungan kerja dan masyarakat luas (Candra & Kurniati, 2024).



Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT OP Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan DJP tahun 2023

Grafik menunjukkan tren positif kepatuhan pelaporan SPT Orang Pribadi Karyawan selama 2019–2023. Jumlah WP yang melaporkan SPT terus meningkat, disertai rasio kepatuhan yang mencapai lebih dari 90% sejak 2021. Capaian ini mencerminkan efektivitas pendampingan, edukasi, serta sistem pelaporan digital yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Meski demikian, masih banyak WP Orang Pribadi yang belum memahami pentingnya pelaporan SPT. Beberapa penyebab utama ketidakpatuhan meliputi kurangnya pemahaman cara pelaporan, anggapan bahwa pajak nihil tidak perlu dilaporkan, serta keyakinan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi oleh pemberi kerja (Pahlev dkk., 2025).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan sebagai instansi gabungan dari Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro serta Dinas Perdagangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak seluruh ASN di Lingkungan mereka. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan pelaporan SPT. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis mengenai pengisian SPT, meminimalisir kesalahan pelaporan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah (DPRD Kab. Bangkalan, 2024).

Berbagai penelitian dan praktik di daerah lain menunjukkan bahwa program pendampingan pelaporan SPT secara langsung maupun melalui digitalisasi (e-filing) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Chamalinda dkk., 2024). Pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan

tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan, tetapi juga membangun rasa nyaman dan kepercayaan dalam menjalankan kewajiban

perpajakan. Selain itu, edukasi mengenai konsekuensi ketidakpatuhan, seperti sanksi administrasi dan pidana juga mendorong wajib pajak untuk lebih taat terhadap peraturan perpajakan (Selvia & Lukman, 2024).

Sinergi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Program Studi Diploma III Akuntansi FEB UTM serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan telah berjalan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan pelaporan pajak. Melalui kegiatan ini, diharapkan tingkat pelaporan SPT OP dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan (Iswantoro, 2024). Pendampingan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah, Kampus dan otoritas pajak dalam meningkatkan *tax compliance*. Hal ini sejalan dengan upaya DJP yang terus mendorong kemitraan strategis guna memperluas jangkauan edukasi dan asistensi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

## METODE

Kegiatan ini menggunakan model partisipatif-edukatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Program Studi D-III Akuntansi, Tax Center FEB Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan KPP Pratama Bangkalan, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari hingga 11 Maret 2025. Subjek dalam kegiatan ini adalah ASN dan pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, sedangkan pelaksana kegiatan adalah 40 relawan mahasiswa dari Program Studi D-III Akuntansi UTM yang ditempatkan di berbagai instansi, termasuk tujuh orang yang secara khusus mendampingi pelaporan di Usaha Mikro dan Perdagangan.

Teknik pemilihan peserta dalam kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan *convenience sampling*, yaitu memilih peserta yang mudah dijangkau dan bersedia mengikuti kegiatan pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian masyarakat berfokus pada efektivitas pelaksanaan program serta keterjangkauan sasaran, sehingga memungkinkan pendampingan dilakukan secara optimal dalam keterbatasan waktu dan sumber daya. Meskipun *convenience sampling* merupakan bagian dari metode non-probabilitas yang memiliki keterbatasan dalam hal keterwakilan populasi, pendekatan ini tetap relevan untuk memperoleh gambaran awal mengenai perilaku kepatuhan pelaporan SPT serta permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam konteks spesifik lokasi kegiatan (Surugiu dkk., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, serta wawancara informal dengan wajib pajak dan petugas dinas. Selain itu, dilakukan evaluasi berkelanjutan selama pelaksanaan program, baik saat proses pendampingan berlangsung, maupun pada akhir kegiatan.

Tahapan kegiatan meliputi: (1) Tahap penyuluhan dengan briefing awal oleh KPP kepada relawan tentang prosedur pelaporan dan penggunaan aplikasi e-filing; (2) Tahap arahan yaitu pendampingan langsung oleh relawan kepada WP di lapangan; (3) Tahap pelaksanaan program pendampingan berupa asistensi teknis pelaporan SPT tahunan Wajib (Huda dkk., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Diploma III Akuntansi FEB Universitas Trunojoyo Madura bekerja sama dengan *Tax Center* UTM dan KPP Pratama Bangkalan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi ASN dan pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan, kami bermaksud menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan pelaporan pajak. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif dan teknis dalam membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan dalam program ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan asistensi langsung terhadap wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman teknis serta perilaku kepatuhan, terutama bagi ASN dan pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki keterbatasan literasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian pengabdian masyarakat sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan asistensi pelaporan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Akbar dkk., 2026). Selain itu, kajian empiris lain juga menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan edukasi perpajakan secara langsung berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak, karena peserta memperoleh keterampilan praktis dalam mengisi dan melaporkan SPT yang sebelumnya belum dimiliki (Wibowo dkk., 2025).

Pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan dalam kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan pemahaman praktis wajib pajak terhadap prosedur perpajakan yang selama ini dianggap rumit. Melalui interaksi langsung antara relawan dan wajib pajak, berbagai kendala teknis maupun administratif dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara langsung, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan SPT. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa asistensi dan pendampingan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi kelompok yang masih membutuhkan bimbingan dalam memahami ketentuan dan prosedur pelaporan pajak. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan tidak hanya bersifat membantu secara teknis, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang mendorong kepatuhan pelaporan pajak secara berkelanjutan (Fahmi dkk., 2024).



Gambar 2. Surat Permohonan Fasilitasi dan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan  
Sumber: Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi  
Diploma III Akuntansi

Program pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh relawan pajak merupakan salah satu upaya konkrit dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengabdian kepada negara, dalam hal ini guna membantu kelancaran proses pelaporan SPT Tahunan pajak agar tercapai penyelenggaraan administrasi negara yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan serta untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Tax Center yang berada di bawah Jurusan Akuntansi FEB Universitas Trunojoyo Madura dengan KPP Pratama Bangkalan, serta melibatkan total 40 relawan mahasiswa yang ditempatkan di berbagai instansi. Penempatan relawan tidak hanya di KPP Pratama Bangkalan, ada tujuh mahasiswa yang bertugas mendampingi pelaporan SPT ASN dan pelaku UMKM termasuk di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan



Gambar 3. Pendampingan SPT tahunan Dinas Koperasi.

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Relawan Pajak di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, 2025

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pembekalan (*briefing*) oleh KPP kepada seluruh relawan mengenai prosedur teknis pelaporan pajak, penggunaan e-Filing, dan etika pelayanan kepada wajib pajak. Selanjutnya, program memasuki tahap pelaksanaan di mana relawan terlibat langsung dalam memberikan asistensi kepada ASN dan pelaku usaha dalam pengisian dan pelaporan SPT.

Pendampingan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan difokuskan pada pemberdayaan ASN serta pelaku UMKM binaan, mengingat masih rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan tersebut (Widati dkk., 2025). Dalam pelaksanaannya, relawan pajak memberikan asistensi secara langsung melalui konsultasi, bimbingan teknis pengisian SPT, hingga pengunggahan data melalui sistem DJP Online. Para peserta juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung terkait permasalahan perpajakan yang dihadapi dalam menjalankan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

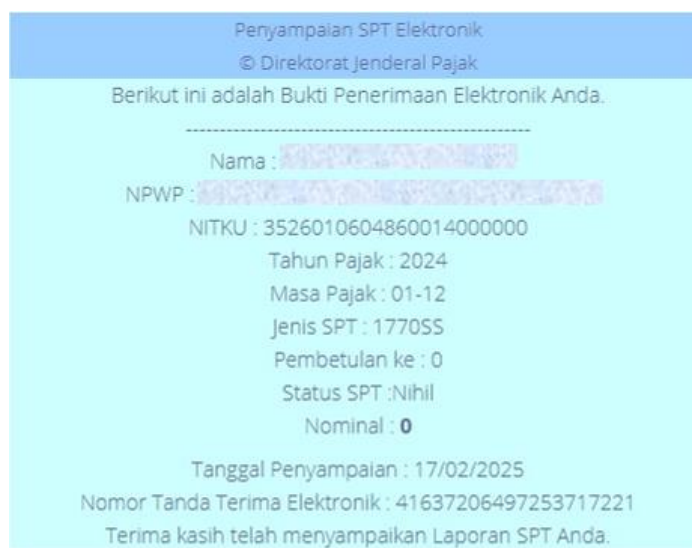


Gambar 4. Pendampingan SPT tahunan Dinas Koperasi.

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Relawan Pajak di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, 2025

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif. ASN dan pelaku UMKM dibantu untuk memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk bagaimana mengisi dan melaporkan SPT dengan benar. Selama proses pendampingan, ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak meskipun penghasilan nihil, keterbatasan akses teknologi, hingga rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak.

Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran pajak dan meminimalisasi kesalahan pelaporan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Beberapa ASN yang sebelumnya belum melaporkan SPT tepat waktu menjadi lebih disiplin dan memahami pentingnya pelaporan. Pelaku UMKM yang semula belum memiliki NPWP juga mulai didorong untuk mendaftarkan diri. Lebih jauh, program ini diharapkan dapat memperkuat budaya kepatuhan pajak di kalangan UMKM Kabupaten Bangkalan, melalui peningkatan literasi dan pendampingan langsung yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang inklusif dan partisipatif



Gambar 4. Penyampaian SPT Elektronik

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Relawan Pajak di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, 2025

Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan *tax compliance* secara langsung, tetapi juga memperkuat literasi pajak sebagai bagian dari pembangunan budaya sadar pajak di lingkungan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil-hasil studi terdahulu yang menyatakan bahwa intervensi berupa asistensi teknis dan edukasi terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak (Zahra Gunawan dkk., 2024).

Secara keseluruhan, keberhasilan program relawan pajak di Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan menjadi gambaran sinergi nyata antara institusi pendidikan tinggi, otoritas perpajakan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan.

## SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat berupa pendampingan SPT OP yang dilaksanakan di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan kerjasama antara KPP Pratama Bangkalan, Tax Center Universitas Trunojoyo Madura dan program Studi Diploma III Akuntansi FEB UTM telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan ASN serta pelaku UMKM. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, otoritas pajak, dan pemerintah daerah, program ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi perpajakan dan membangun budaya kepatuhan pajak di tingkat lokal. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang perpajakan.

Keberhasilan program ini tercermin dari meningkatnya kesadaran pajak, menurunnya kesalahan dalam pelaporan SPT, serta bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Manfaat nyata dari program ini dirasakan langsung oleh peserta, baik dari kalangan ASN maupun UMKM, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam proses pelaporan pajak.

Implikasi dari program ini bagi komunitas adalah terbentuknya budaya sadar pajak yang lebih kuat di kalangan ASN dan pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan langsung dan berkelanjutan, masyarakat menjadi lebih paham akan hak dan kewajiban perpajakannya, serta terdorong untuk aktif dalam melaporkan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi praktik baik yang berkelanjutan dan diterapkan secara lebih luas dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan daerah dan pembangunan ekonomi lokal yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Y. R., Agusra, D., Zain, I., Sofyan, D., Jusmarni, J., Prihastuti, A. H., & Adriyani, A. (2026). Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepatuhan Pajak melalui Edukasi dan Asistensi Tax Center. *JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi Dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 6(1), 32–36. <https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1806>
- Candra, S. A., & Kurniati, D. (2024). *ASN Perlu Laporan SPT Tahunan, Jadi Syarat Dapat Tukin dan Naik Pangkat*. DDTCTNews - Berita Pajak Terkini dan Terpercaya di Indonesia dan Internasional. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1800041/asn-perlu-laporan-spt-tahunan-jadi-syarat-dapat-tukin-dan-naik-pangkat>
- Chamalinda, K. N. L., Kusufi, M. S., Faisol, I. A., Hakim, T. I. R., Gitayuda, M. B. S., Lutfia, C., Rohma, F. F., Zulfatillah, A., & Listiana, Y. (2024). Laporan SPT Melalui E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 144–151. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.541>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-07/Data%20Statistik%20-Laporan%20Tahunan%20DJP%202021.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Tingkatkan Daya Saing UMKM, Kantor Pajak Serang Adakan BDS*. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-11/34.%20Tingkatkan%20Daya%20Saing%20UMKM%2C%20Pajak%20Serang%20Adakan%20BDS.pdf?utm\\_](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-11/34.%20Tingkatkan%20Daya%20Saing%20UMKM%2C%20Pajak%20Serang%20Adakan%20BDS.pdf?utm_)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Gandeng UMKM, Pajak Jateng II Tingkatkan Kepatuhan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/gandeng-umkm-pajak-jateng-ii-tingkatkan-kepatuhan-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Penyuluh Pajak Sampaikan Batas Pelaporan SPT Tahunan*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/index.php/id/berita/penyuluh-pajak-sampaikan-batas-pelaporan-spt-tahunan>
- DPRD Kab. Bangkalan. (2024, Juli 9). *Komisi B Minta Diskop UM Lakukan Pendampingan dan Sosialisasi Kepada Pelaku UMKM*. <https://dprd.bangkalankab.go.id/read/berita/dprd.bangkalankab.go.id>
- Fahmi, A., Haniyah, R., & Wardana, A. B. (2024). Pendampingan dan Edukasi Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 257. <https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1877>
- Huda, N., Muheramtohad, S., & Ningsih, T. W. (2020). *The Effect of Willingness to Pay Taxes and the Level of Understanding of Taxpayers on Tax Payment Compliance*.
- Iswantoro. (2024). *KPP Pratama Bangkalan Berikan Pendampingan UMKM*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/umkm/649559/kpp-pratama-bangkalan-berikan-pendampingan-umkm>
- Kuhuparuw, V. J., Ardiansyah, A., & Nunumete, L. S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Compliance with OP Annual SPT Submission. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(4), 30534–30547. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7211>
- Pahlev, I. R., Pentanurbowo, S., & Hidayati, F. N. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Karyawan Perorangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2020-2022. *Action Research Literate*, 9(1), 250–260. <https://doi.org/10.46799/ar.v9i1.2613>
- Prabowo, E., Arfina, A., Sakti, S., & Putri, S. E. (2025). *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha di Kota Dumai*. 6(1).
- Selvia, & Lukman, H. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak WPOP melalui Asistensi Pelaporan SPT E-Filing. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1126–1134. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32104>

- Surugiu, M.-R., Vasile, V., Surugiu, C., Mazilescu, C. R., Panait, M.-C., & Bunduchi, E. (2025). Tax Compliance Pattern Analysis: A Survey-Based Approach. *International Journal of Financial Studies*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.3390/ijfs13010014>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2017).
- Wibowo, E. T., Widati, S., Wulandari, D. S., & Putri, S. A. (2025). Edukasi Pajak Berbasis Praktik untuk UMKM: Efektivitas Pendampingan dalam Penghitungan dan Pelaporan PPh dan PPN. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 181-189. <https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.860>
- Widati, S., Yulianti, V., Wulandari, D. S., Pratama, A. D., & Pratama, D. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Literasi Akuntansi dan Pajak untuk Penguatan Legalitas Usaha. 03(02).
- Zahra Gunawan, Riska Ainur Rosyida, & Achmad Wicaksono. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sidoarjo. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 72-79. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i3.2567>